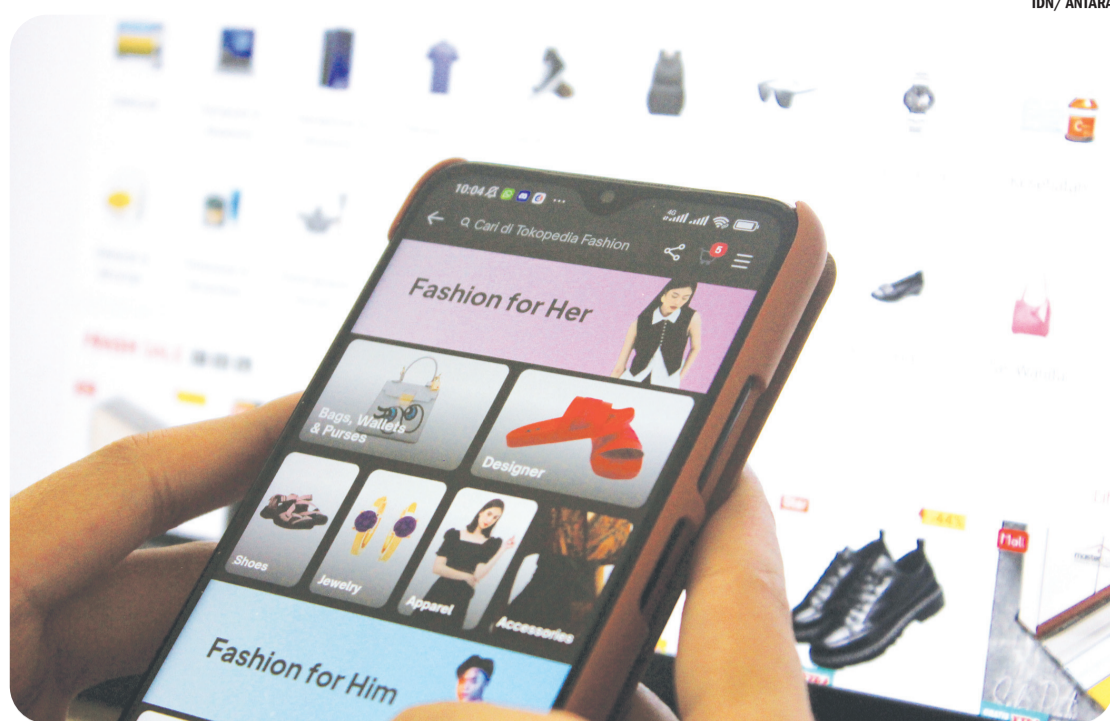


PERDAGANGAN DIGITAL 2023 CAPAI RP533 TRILIUN

Warga mencari barang di lokapasar atau marketplace, Depok, Jabar, Jumat (5/1). Kementerian Perdagangan memperkirakan nilai transaksi perdagangan digital atau e-commerce mencapai Rp533 triliun pada 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp476 triliun.



IDN/ANTARA

BTN Gandeng PPA Pangkas NPL Hampir Rp900 Miliar

“Penyelesaian ini dapat mendukung peningkatan kualitas aset BTN yang berdampak pada peningkatan kinerja Perseroan. Melalui penyelesaian ini, kami optimis dapat memperbaiki rasio NPL yang diharapkan dapat turut mendorong pertumbuhan bisnis Perseroan,” kata Nixon Napitupulu.

JAKARTA (IM) - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menggandeng PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dalam melakukan penyelesaian aset berkualitas rendah atau non-performing loan (NPL). Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu me-

nyampaikan dengan adanya sinergi tersebut, Bank BTN berhasil memangkas NPL secara signifikan sekitar hampir Rp900 miliar. “Penyelesaian ini dapat mendukung peningkatan kualitas aset BTN yang berdampak pada peningkatan kinerja Perseroan. Melalui penyelesaian

ini, kami optimis dapat memperbaiki rasio NPL yang diharapkan dapat turut mendorong pertumbuhan bisnis Perseroan,” kata Nixon dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (5/1). Dikutip dari Antara, transaksi penyelesaian aset berkualitas rendah telah diselesaikan oleh Perseroan dan pihak-pihak terkait pada akhir tahun lalu. Hasilnya, transaksi itu berhasil memangkas rasio NPL secara signifikan. Menurut Nixon, penyelesaian NPL tersebut merupakan wujud nyata sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus komitmen Bank BTN untuk senantiasa memperbaiki kualitas aset, sehingga perseroan dapat berfokus dalam menyediakan

solusi kepemilikan rumah bagi masyarakat. “Upaya perbaikan kualitas aset di Bank BTN sejalan dengan arah bisnis Perseroan untuk aktif mendukung pemerintah dalam meningkatkan penyediaan hunian yang layak melalui layanan pembiayaan perumahan terbaik,” ujarnya. Direktur Utama PPA Muhammad Teguh Wirahadikusumah mengatakan, PPA sebagai bagian dari Holding BUMN Danareksa berkomitmen untuk turut mendukung stabilitas perbankan nasional melalui solusi penyelesaian NPL. PPA sebagai pengatur (ar-ranger) membantu BTN dalam melakukan penyelesaian NPL melalui uji tuntas yang seksama,

komunikasi dengan para pemangku kepentingan terkait, serta mengedepankan manajemen risiko yang terukur. “Penyelesaian NPL Bank BTN ini diharapkan dapat membuka peluang yang luas untuk bersinergi dengan industri perbankan, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun swasta, sehingga dapat memberikan nilai dan manfaat bagi industri perbankan Indonesia,” tuturnya. Adapun sinergi Bank BTN dengan PPA telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Dalam hal, PPA sudah berpengalaman dalam bisnis pengelolaan aset bermasalah di beberapa bank swasta. • pan

Greenland International Industrial Center, Kawasan Industri Percontohan Nasional Bertaraf Internasional



Kawasan Greenland International Industrial Center di Kota Deltamas, Cikarang, Jawa Barat.

CIKARANG (IM) - Kawasan industri dinilai berperan besar dalam membangkitkan perekonomian karena memiliki peluang bagi masuknya investasi dan daya serap tenaga kerja yang semakin tinggi. Salah satu kawasan industri yang berkembang pesat di Indonesia adalah Greenland International Industrial Center (GIIC) di Kota Deltamas, Cikarang, Jawa Barat. Dengan lahan industri seluas ±2.200 hektare, Greenland International Industrial Center (GIIC) telah menjadi lokasi bisnis bagi 170 tenants yang dilengkapi dengan sarana prasarana ramah lingkungan bertaraf internasional, seperti fasilitas pengolahan air bersih dan air limbah, penyediaan tenaga listrik dengan pelayanan premium, pasokan

gas, jaringan telekomunikasi, serta instalasi serat optik. Presiden Direktur PT Puradelta Lestari Tbk, Hongky J. Nantung mengatakan sebagai kawasan industri yang terintegrasi dengan kawasan hunian dan area komersial, GIIC telah mendapatkan pengakuan dunia internasional. “Hal ini dibuktikan dengan beragam penghargaan yang telah diraih GIIC seperti World Silver Winner kategori Industri FIABCI World Prix d’Excellence Awards 2022 di Prancis dan juga Best Industrial Estate Development PropertyGuru Asia Property Awards 2022 di Thailand,” kata Hongky. Salah satu yang membedakan GIIC dengan kawasan industri lain di Indonesia adalah konsep ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang diterapkan dengan standar low pollution industrial.

Semua tenant di GIIC secara keseluruhan diwajibkan untuk mengontrol polusi udara dan suara yang dihasilkan. Proses ini dipantau oleh pihak Kota Deltamas sejak produksi, material hingga bahan bakar. Penggunaan batu bara pun tidak diizinkan di kawasan industri GIIC sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam penerapan sustainable development. Selain itu, GIIC melakukan penghijauan di seluruh area termasuk perangkat listrik hemat energi serta penggunaan lampu LED dan lampu PJU (penerangan jalan umum) hybrid dengan solar panel. Kendaraan operasional Kawasan industri GIIC juga sudah menggunakan tenaga listrik.

GIIC merupakan salah satu kawasan industri (KI) percontohan tambahan dari proyek Global Eco-Industrial Parks Programme (GEIPP) Fase II. Proyek GEIPP Fase II ini akan dimulai secara efektif pada 1 Januari 2024 dan sekaligus menunjukkan keseriusan Kementerian Perindustrian (Kemperin) dalam upaya transformasi KI menjadi lebih berwawasan lingkungan melalui penerapan konsep Eco Industrial Park (EIP). Penerapan konsep EIP merupakan salah satu langkah menjaga lingkungan melalui penciptaan desain hijau dari infrastruktur, perencanaan, penerapan konsep produksi bersih, pencegahan polusi, pengelolaan limbah, pengendalian

emisi, dan efisiensi energi di kawasan industri. Selaras dengan hal tersebut, penerapan EIP diharapkan dapat ikut mewujudkan Net Zero Emission (NZE) sektor industri. GIIC telah menerapkan konsep berwawasan lingkungan. Khususnya dalam meningkatkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkontribusi terhadap pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan. Sinar Mas Land menjadi salah satu pengembang properti di Indonesia yang telah mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan yang diterapkan dalam produk properti untuk mengurangi emisi karbon hingga 34% pada tahun 2034 mendatang. • vit



GIIC mengusung konsep ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang diterapkan dengan standar low pollution industrial.

LPS Bayar Klaim Simpanan Nasabah BPR Wijaya Kusuma

JAKARTA (IM) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memproses dan membayar klaim penjaminan simpanan nasabah Bank Perkonomian Rakyat (BPR) Wijaya Kusuma di Madiun, Jawa Timur hingga 31 Mei 2024. “Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Wijaya Kusuma, LPS akan memastikan simpanan nasa-

bah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Sekretaris Lembaga LPS Dimas Yuliharto di Jakarta, Jumat (5/1). Dikutip dari Antara, proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin BPR Wijaya Kusuma dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 4 Januari 2024 karena BPR tersebut tidak

memenuhi tingkat permodalan dan tingkat kesehatan. Selanjutnya, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar. Dimas mengatakan rekonsiliasi dan verifikasi akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha BPR, yaitu paling lambat 31 Mei

2024. Pembayaran dana nasabah akan dilakukan secara bertahap selama kurun waktu tersebut. Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Wijaya Kusuma dengan menghubungi tim likuidasi. Ia mengimbau agar nasabah BPR Wijaya Kusuma tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi

untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank. Nasabah juga diimbau untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah. • hen

BPR SUPRA

PULAUINTAN
General Contractor

PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

DJP Bukukan Pajak PMSE Sebesar Rp16,9 Triliun

JAKARTA (IM) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp16,9 triliun. Data tersebut berasal dari 163 perusahaan pemungut per Desember 2023.

11% atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia. Selain itu, pemungut juga wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran. Guna menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha, baik konvensional maupun digital, ke depan pemerintah masih akan terus meninjau para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia. Penunjukan pemungut PPN PMSE atau usaha digital ini merupakan suatu wujud kemampuan adopsi teknologi oleh pemerintah sebagai salah satu prasyarat menuju Indonesia Maju 2045.

DJP merinci, jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran 2020, Rp3,90 triliun setoran 2021, Rp5,51 triliun setoran 2022 dan Rp6,76 triliun setoran 2023. “Untuk pemungut PPN PMSE, jumlahnya tidak bertambah dibandingkan bulan lalu yaitu sebanyak 163 pemungut,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti, dalam keterangannya, Jumat (5/1).

Dwi menjelaskan, untuk Desember 2023 kemarin pemerintah hanya melakukan pembetulan elemen data dalam surat keputusan penunjukan atas Iqiyi International Singapore Pte. Ltd. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE wajib memungut PPN dengan tarif

Ini Fokus Asri Karya Lestari Usai IPO

JAKARTA (IM) - PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI) mencatatkan saham perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (5/1). Dana hasil IPO senilai Rp125 miliar, akan digunakan untuk ekspansi proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Direktur Utama ASLI Sudjatmiko mengatakan, sebagai perusahaan general contractor, perseroan menargetkan kontrak pembangunan IKN senilai Rp100 miliar. “IPO adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan ekspansi usaha, kapasitas pendanaan, tata kelola, dan prinsip keterbukaan yang lebih baik sebagai perusahaan publik, yang diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi stakeholder kedepannya,” ujar Sudjatmiko di Main Hall BEI, Jakarta, Jumat

perengkapan proyek, serta untuk membiayai kegiatan operasional perseroan. “Hadirnya perseroan sebagai pionir general contractor di bursa, diharapkan dapat membangkitkan semangat industri jasa konstruksi tanah air untuk semakin maju, berkembang dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujar Sudjatmiko. Selain pembangunan IKN, ASLI saat ini sedang mengerjakan sejumlah proyek, di antaranya pembangunan jembatan South City Pondok Cabe Tangerang Selatan, flyover Pasir Gombang, Cikarang, dan pembangunan jembatan Asulait II di Kabupaten Bellu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian, Jembatan Overpass Antelope, Kantor Operasional Cikunir, Kedutaan Besar Australia, Gerbang Tol Kebon Bawang, proyek APBD Jawa Barat, serta jalan tol Serang Panimbang.

Ia memaparkan sebanyak 66,35 persen dana hasil IPO akan digunakan untuk setoran modal pada anak usaha yaitu PT Bumi Prima Konstruksi sebesar 56,25 persen, di antaranya untuk pembelian alat berat berupa rotary drilling rig, mobile crane, crawler crane, foco crane trailer, dan dolly trailer truck. Kemudian, untuk anak usaha yaitu PT Manyar Perkasa Mandiri sebesar 43,75 persen untuk pembelian mesin produksi batching plant. Selain untuk anak usaha, sebanyak 33,65 persen dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja ASLI, yaitu pembayaran material,

selain itu, perseroan sedang menyelesaikan pembangunan jembatan lengkung Pacongkang Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, dan flyover Boulevard Kota Deltamas. Dalam IPO, perseroan menawarkan 1,25 miliar lembar saham atau setara 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga IPO sebesar Rp100 per lembar saham. Bertindak sebagai penjamin emisi efek adalah NH Korindo Sekuritas Indonesia. • dot